

Relegiusitas Yahweh Dalam Tranformasi Sistem Politik Israel Zaman PL

Sipora B. Warella
Institut Agama Kristen Negeri Ambon

Abstract: *Confederation the tribes of Israel adopted the belief in Yahweh. This religiousitas have implication to politic sistem of Israel starting from the desert until Israel monarchy. Relegiousitas Yahweh appears on theocracy is take place in politic system, social, economy in Israel. This is make political system around the nation with Israel: Kings no no wrong, the King is god or son of god, system capitalism and feudalism. Relegiousitas Yahweh has a power within the leadership of king of Israel economy, social revolution. But the transformation of Israel's system into the same system with nation about getting noticed serious writers of The Old Testament, like writers Ur-Deuteronomy in Deuteronomy 17:14-20. The theory of the political system, David Easton is used in line with the contribution of the results of the hermeneutist text is the Israel political system must be fixed so that theocracy organization values living together can maintain the existence of Israel within the patern agrement suzerain vassal.*

Keywords: : *Religiuitas Yahweh, Transformasi Israel, sistem politik*

PENDAHULUAN

Suku-suku Israel yang mengadopsi kepercayaan kepada Yahweh, secara politis berkonfederasi. Kepercayaan kepada Yahweh dari segi religius berimpilikasi juga pada sistem politik Israel. Hal ini menarik karena eksistensi Israel sebagai suatu unit sosial/ suku padang gurun¹ yang

¹ Kata yang diterjemahkan 'padang belantara' atau 'gurun' meliputi gurun-gurun bukit pasir tandus atau batu karang, padang rumput dan padang penggembalaan yang cocok untuk menggembalakan ternak,

berpolakan nomaden dengan sistem politik² padang gurun mengalami

Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II, YKKB, Jakarta YKKB OMF, 2005, 186.

² Sistem merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh. Politik dari kata bahasa Arab: *siyasyah* yang diterjemahkan kemudian menjadi siasat, dalam bahasa Inggris *politics*. Asal mula kata politik dari kata polis yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus dengan manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul

progress transformasi signifikan dengan adanya konfederasi suku-suku. Kepercayaan kepada Yahweh menjadi kekuatan religius *include* dalam konten kemasyarakatan yang memproduksi nilai, simbol religius, konstruk berpikir, hingga ranah praktis religius, sosial, ekonomi, ideologi dan politik konfederasi suku-suku Israel. Dengan kata lain konten ekonomi, politik, sosial dan ideologi Israel berbasis pada religiusnya.

Sistem politik Israel yang berkonfederasi menjadi sebuah kerajaan berbeda dengan bangsa-bangsa sekitar, karena Israel menerapkan sistem teokrasi. Dalam kepemimpinan teokrasi, Allah memilih raja yang dalam kepemimpinannya mencerminkan kepemimpinan Allah,

aturan, kewenangan dan pada akhirnya kekuasaan, demikian Pamudji. Politik adalah subsistem dari sistem sosial. Sistem politik adalah kumpulan pendapat dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu satu sama lainnya atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara lain. Sistem politik juga diartikan sebagai suatu sistem atau perangkat yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu pemerintahan/politik yaitu suatu sistem dalam menerapkan aturan dalam hubungan sosial manusia yang meliputi kewenangan kekuasaan hukum dan kewajiban. Komponen sistem politik sebagai budaya meliputi nilai, sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik dan yang berpengaruh dalam masyarakat, demikian Samuel P. Huntington, <https://www.zonareferensi.com>, diakses tgl 20 September 2018.

menerapkan aturan-aturan Allah yang terstandar pada Taurat. Raja yang tidak konsisten pada teokrasi, tidak menerapkan aturan-aturan Allah berakibat bencana politik bagi bangsanya. Penulis maksudkan dengan bencana politik ialah kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan: Israel Utara dan Israel Selatan - terposisi menjadi jajahan bangsa-bangsa kuat dan besar dan akhirnya berada dalam pembuangan. Teks Ulangan 17:14-20 memebrikan perhatian khusus bagi raja Israel yang harus menampakan perbedaan kepemimpinannya di banding raja-raja bangsa sekitar sehingga teks ini mengulas hukum tentang raja, batasan-batasan seorang raja dalam kepemimpinannya. Sistem politik teokrasi di Israel yang berkonfederasi mengalami transformasi awal dari sistem kepemimpinan para tua ke arah kepemimpinan raja. Israel saat menetap mencermati sistem politik bangsa sekitar dalam kepemimpinan seorang raja sehingga Israel mengarahkan sistim kepemimpinan para tua menjadi kepemimpinan raja yang menerapkan kepemimpinan teokrasi (I Sam.8, 9 band. I Sam.10, 15, 16). Yahweh memiliki otoritas terhadap raja dalam kepemimpinannya sehingga raja merupakan representasi Yahweh. Hal ini berdampak dalam kehidupan masyarakat di mana semua orang dari masing-masing suku terlindungi hak-haknya tidak ada yang terpinggirkan secara politik karena Yahweh menjamin dan melindungi hak hidup tiap individu. Hal lain, di Israel telah menguat konstruk *personality cooperation* sehingga jikalau seorang individu terancam maka hal ini dipandang menjadi ancaman komunitas.

Perbedaan religiusitas yang berimplikasi pada ranah politik sebagaimana paparan sebelumnya menjadi dasar Israel melakukan agresi memperluas wilayah-wilayah strategis dan subur di antara bangsa-bangsa penempat di Palestina bahkan setelah menetap melakukan revolusi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi mereka tapi juga terhadap tatanan nilai hidup bangsa penempat. Hal itu tampak pada aturan-aturan yang bermuara pada tertib sosial. Dengan kata lain di Israel berlangsunglah adaptasi, akomodasi dan transformasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa penempat di Palestina tanpa menghilangkan keunikan nilai-nilai yang mereka anut sejak awal sebagai umat pilihan Yahweh seperti solidaritas sosial, *hospitality*, suaka, pembalasan dendam berdarah, kesederajatan dan nomad pastoral gembala atau pastrolal *transhumant* sehingga Israel dapat melakukan revolusi sosioekonomi dan politik terhadap tatanan nilai yang dimiliki bangsa-bangsa penempat yang bercorak feodalis dan imperialis di mana raja tidak pernah salah.

Israel mengalami titik balik dalam transformasi politik ketika mengadopsi sistem politik bangsa lain dengan filosofi *kings no wrong* sehingga jaminan keamanan dan hak-hak masyarakat tidak lagi terjamin. Feodalisme dan imperialisme berkembang dalam sistem politik, kelas-kelas sosial kuat memiliki kontribusi dan bersinergi dengan sistem politik. Transformasi ini mendapat perhatian para nabi dan penulis kitab sehubungan dengan tidak konsisten penerapan teokrasi. Teks Ulangan 17:14-20 berisikan hukum tentang raja, batasan-batasan seorang raja dalam

kepemimpinannya menjadi teks kosentrasi penulis dengan menggunakan pendekatan pustaka. Pendekatan pustaka dalam artian penulis menggunakan referensi pustaka untuk mengeksplor hermeneutis teks dimaksud selanjutnya hasil hermenutis tersebut melakukan analisis teks mengalami analisis dengan menggunakan teori sistem politik David Easton yang daripadanya penulis menemukan raja Israel harus tetap menerapkan teokrasi dalam proses penerapan sistem politik Israel, raja harus taat dalam menerapkan hukum-hukum dan peraturan yang menjamin hak-hak rakyat, raja harus mempertahankan nilai-nilai kehidupan bersama meskipun Israel mengalami transformasi sistem politik di tengah bangsa sekitar. Hal ini akan bermuara pada mempertahankan eksistensi Israel dalam pola perjanjian suzerain vassal.

Isi

Religiusitas Yahweh dalam sistem politik konfederasi suku-suku Israel hingga kerajaan

Religiusitas Yahweh berlangsung dalam sistem politik Israel dalam kerangka/ Pola Perjanjian Suzerain Vassal artinya Yahweh dipandang oleh Israel sebagai raja besar atau suzerain yang mempunyai bangsa taklukan yaitu Israel. Sebagai raja besar Yahweh dipandang mempunyai kuasa yang melebihi segala sesuatu termasuk atas bangsa-bangsa, Yahweh mampu mengalahkan bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel karena Yahweh telah memilih Israel di antara bangsa-bangsa menjadi umat pilihanNYA. Musuh Israel sama artinya dengan musuh Yahweh. Yahweh dipandang mampu mempersatukan mereka sebagai

suku-suku nomad dalam satu kendali politik sebelum menetap di Palestina bahkan setelah menetap dan menjadi sebuah kerajaan. Yahweh mengikat perjanjian dengan Israel sebagai bangsa pilihanNYA, dan bangsa Israel akan hidup menurut aturan yang ditetapkan oleh Yahweh. Dengan kata lain politik pemerintahan di Israel berlangsung dalam pola teokrasi. Hal ini telah terbangun sejak Israel berada dalam posisi suku-suku padang gurun. Israel sebelum menjadi suatu bangsa yang menetap di Palestina, bermula dari suku-suku padang gurun yang memiliki sistem politik padang gurun oleh kepala suku, klen dengan perlindungan individu oleh suku dan sebaliknya perlindungan suku oleh individu. Hal ini tidak dapat terlepas dari segi sosial Israel. Awal Israel berlaku umum bahwa semua orang Israel menikmati secara lebih atau secara kurang dari standar kepemilikan yang sama dalam hidup mereka. Dengan kata lain berdasarkan nilai-nilai hidup di padang gurun, yang harus dikedepankan dalam hidup ialah sistem sosial politik yang tetap menjamin tertib sosial politik setiap suku, klen dan keluarga, individu meskipun dalam kehidupan mereka terdapat individu atau keluarga dengan kepemilikan yang lebih banyak dari yang lain, dan menjaga kesederajatan hidup bersama karena Israel meyakini Yahweh menetapkan yang demikian melalui hokum-hukum dan peraaaturan-peraaaturan.

Sebagai nomad, suku-suku Israel yang hidup di padang gurun kemudian memilih menetap dan ditemukan bukti-bukti arkheologis kerusakan kota-kota Debir, Lakhis, dan Hazor pada periode 1250-1000 SM, hal ini searah dengan

informasi kitab Yosua pasal 1-11. Orang-orang Israel berdiam di sebelah Selatan, Tengah dan Utara Palestina, terutama di dataran-dataran tinggi tempat tidak terdapat banyak kota; daerah suku-suku Israel itu terbagi tiga bagian karena diapit oleh daerah-daerah perbukitan dari orang-orang Kanaan yang kuat, yaitu yang terdapat di sekitar Yerusalem dan di Dataran Esdraelon. Suku Ruben, Simeon dan Lewi telah berada di tanah Kanaan sebelum Yosua dan rombongannya tiba. Ruben memperoleh tanah di sebelah Timur Laut Mati di tempat Moab berkuasa beberapa abad lamanya, Simeon dan Yehuda sama-sama membagi daerah yang sama, keduanya kemudian hari melebur menjadi satu dengan Yehuda sebagai pemimpin. Suku Lewi dengan segera berubah menjadi suatu persekutuan agamawi tanpa memiliki tanah warisan³. Yehuda adalah dataran tinggi yang tidak terlalu luas, dibatasi pebukitan di kaki gunung di sebelah Barat dan padang gurun di sebelah Timur dan Selatan. Hanya di sebelah Utara dataran itu menyatu dengan pebukitan Benyamin⁴.

Pada zaman perunggu tengah (1950-1550 SM) kelompok-kelompok setengah pengembara, termasuk '*Apiru*' (barangkali juga Bapa Leluhur Israel) memasuki lembah-lembah yang terletak di antara kota-kota berkubu. Orang Filistin adalah yang pertama menggunakan besi di Palestina (sebuah parang dan pisau besi dalam sebuah kuburan Tell el-Far'a), dan orang Israel

³ *Ibid*, 97-100.

⁴ Robert B. Coote, *Demi Membela Revolusi*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2011, 85-86.

lamban sekali mengatasi monopoli ini dan tentunya keunggulan Filistin di bidang ekonomi sebagai akibatnya (lihat informasi teks I Samuel 13:18-22). Orang-orang Israel pada zaman Hakim-Hakim mendirikan rumah-rumah berkualitas rendah (Betel), atau tinggal di tingkat bawah gedung-gedung yang direbut dari orang Kanaan (Beit Mirsim) atau tinggal di desa-desa yang mereka bangun secara asal jadi (Gat, Raqqat). Tembikar mereka kasar dan kualitasnya kalah dibandingkan tembikar buatan orang Kanaan.

Benteng Saul di Gibea (Tell el-Ful) menunjukkan bagaimana orang Israel mengikuti sistim Utara membangun dinding lengkung untuk benteng pertahanan. Kehidupan di sini sangat sederhana, kendati diwarnai oleh beberapa senjata impor. Zaman Salomo menunjukkan meningkatnya pemakaian besi dan teknik membangun⁵.

Dari segi politik penguasaan wilayah bangsa Israel tidak berhasil menguasai tanah Palestina seluruhnya, dan menetap di daerah-daerah yang sempat direbutnya. Selama satu abad lebih bangsa Asyur dan Mesir sedang lemah dalam kepemimpinan, sehingga mereka tidak sanggup memainkan suatu peranan penting dalam kancah percaturan politik antar bangsa pada masa itu. Bangsa-bangsa pengembara di padang gurun bagi Israel perlu ditertibkan agar bangsa Israel dapat hidup dengan tentram. Begitu pula suku-suku bangsa yang berbahasa Aram yang berdiam di sebelah Timur Sungai Yordan pada waktu itu sedang

berusaha memperluas wilayah mereka. Dari antara musuh-musuh Israel itu yang paling berbahaya dan selalu merupakan ancaman serius bagi Israel adalah bangsa Filistin dan bangsa-bangsa laut lainnya. Bangsa Filistin mendiami daerah pantai Selatan Palestina dan menghuni lima kota di sana yaitu Gaza, Askleon, Asdod, Gat, dan Ekron. Masing-masing kota itu diperintah oleh rajanya sendiri, namun dalam menghadapi peperangan kelima kota itu bergabung. Bangsa Filistin adalah bangsa pertama yang menggunakan besi sebagai bahan untuk membuat alat-alat rumah tangga dan senjata-senjata. Karena itu bangsa Filistin dibantu memperoleh kemenangan-kemenangan dalam peperangan. Mereka juga belajar menggunakan kereta-kereta kuda dalam peperangan. Orang-orang Israel sendiri tidak dapat menggunakan kereta-kereta berkuda ini di daerah berbukit-bukit yang mereka diami. Tidak lama sebelum tahun 1000 SM bangsa Filistin mulai menguasai sebagian besar wilayah Palestina⁶.

Boerma dalam Ludji menyatakan⁷ *Ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mereka masing-masing suku memperoleh sebidang tanah. Di antara mereka ada yang memperoleh tanah subur dan ada pula yang memperoleh tanah yang kurang subur dan tandus. Karena itu kemakmuran tidak dapat dimiliki oleh seluruh bangsa Israel secara merata. Keadaan tanah yang kurang subur ini membawa perubahan dalam sistim kemasyarakatan Israel. Selajutnya*

⁵ David F. Hinson, *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1991, 31-43, 61-63.

⁶ *Ibid*, 110-111.

⁷ Barnabas Ludji, *Disertasi*, STT Jakarta, 1996, 246-247.

menurut Willis (seperti dikutip oleh Epzstein 1986: hlm. 56,57) unsur yang paling berpengaruh dalam sejarah umat Allah ialah perjuangan panjang antara dua kelompok masyarakat. Dua kelompok masyarakat yang dimaksudkan ialah kelompok yang memiliki taraf kehidupan yang tinggi di satu pihak dan kelompok nomade yang memiliki peradaban rendah, tetapi merupakan kelompok yang berpengaruh di lain pihak. Kelompok pertama adalah orang Amori yang menjadi tuan tanah dengan dea baal dan membentuk sistim perbudakan. Pandangan Willis ini didukung pula oleh Weber (seperti yang dikutip oleh Epzstein 1986: hlm. 57). Ia berpandangan bahwa walaupun bangsa Israel tidak mengenal sistim kasta, namun dalam kenyataannya Israel termasuk kelas rendah atau masyarakat pinggiran yang senantiasa berjuang menentang masyarakat kelas atas. Perjuangan seperti ini berakhir pada zaman kerajaan; namun pada zaman kerajaan muncul pemisahan kelas baru di tengah-tengah umat Allah.

Berbicara tentang '*Apiru*' sebagaimana dikemukakan David F.Hinson yang saya kutip dalam makalah ini pada alinea keempat segi politik bahwa kelompok-kelompok setengah pengembara, termasuk '*Apiru*' (barangkali juga Bapa Leluhur Israel) memasuki lembah-lembah yang terletak di antara kota-kota berkubu, maka menurut Gottwald⁸ '*Apiru*' tidak dapat dikategorikan dengan

mudah sebagai suatu hegemoni etnis pada suatu tempat atau dihubungkan dengan aktivitas ekonomi tertentu. '*Apiru*' dapat disebut sebagai 'orang luar' yang tidak berasal dari tatanan sosial yang ada, tidak dilindungi oleh hukum sehingga dapat juga dipandang sebagai budak atau hamba. '*Apiru*' sering dihubungkan dengan pengungsian, pelarian dan pemberontakan. Mereka lebih banyak bekerja sebagai pekerja individual atau kelompok konstruksi. Tiap individu memiliki peran berbeda saat masih bekerja sendiri dan saat berintegrasi ke dalam kelompok sebagai tentara bayaran atau pekerja ladang. Lebih lanjut ditambahkan bahwa dalam catatan Amarna, '*Apiru*' sering dikaitkan dengan tentara bayaran. Catatan itu menyebut '*Apiru*' sebagai tenaga militer, mereka biasanya turut ditangkap saat pengepungan, dipakai saat terjadi konflik antarkota, tentara berkereta kuda, logistik dan berbagai aktivitas perang lainnya. Kesimpulan yang dapat dibuat terhadap '*Apiru*' ialah orang-orang '*Apiru*' di Kanaan merupakan pasukan bersenjata yang hebat, beberapa dari mereka ahli kereta perang. Walaupun '*Apiru*' tidak disebutkan dalam jumlah yang besar dalam surat Amarna, tapi paling tidak '*Apiru*' memiliki 2 karakter sosial. Pada satu sisi mereka berguna untuk menakut-nakuti kota lain yang bermusuhan tapi di sisi lain mereka juga dapat menjadi ancaman bagi kelas berkuasa. Pada masa tenang, '*apiru*' mampu menjalin hubungan timbal balik yang menguntungkan kelas penguasa maupun diri mereka sendiri. Penganut Yahwis sejak Keluaran dari Mesir tidak menkonversi rakyat Moab dan

⁸ Norman K. Gottwald, *The Tribes of Yahweh*, New York, Orbis Books, 400-409.

Edom kepada kepercayaan mereka. *'Apiru'* sebagai kekuatan yang menghancurkan sistem. Daerah bukit-bukit menjadi tempat tinggal *'Apiru'* dan kemudian Israel.

Pada awalnya negara-negara transjordan ini tidak memiliki raja yang mewariskan takhtanya turun temurun, tetapi kemudian mereka mengangkat dan dipimpin oleh raja jauh sebelum Israel memilih raja-raja mereka (Kejadian 36:31). Kita memang tidak dapat menyebutkan dengan pasti, kapan negara-negara ini berubah dari masyarakat yang egalitarian, kemudian dipimpin oleh keturunan raja. Dibanding negara-negara lain, Israel yang paling lama berdiri sendiri sebagai suatu kelompok yang terorganisir tanpa raja, hal ini disebabkan karena Israel memiliki agama Yahwis yang menyatukan mereka, hal mana yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju Kanaan tidak berperang melawan Ammon, Moab dan Edom, bahkan ada tradisi yang menyebutkan bahwa Moab dan Edom menjual provinsi mereka kepada penganut Yahwis yang keluar dari Mesir ini (Ulangan 2:28-29). Sistem sosial yang bersinergi dengan sistem politik dibangun dan dikembangkan oleh Israel sejak awal dan saat menetap mengarah pada kerajaan tetap mempertahankan solidaritas sosial dan integritas konfederasi yang berbeda dengan realitas umum di sekitar Israel bahwa bangsa-bangsa sekitar Israel mengenal dan terpola dalam sistem kelas sosial misalnya pada milenium ke tiga SM. Apabila dalam suatu kelompok masyarakat di luar Israel ditemukan ada kelompok sosial yang termarginalkan

atau dieksploitasi yaitu kelas sosial lemah oleh kelompok sosial kuat maka hal ini bukan masalah, kenyataan yang demikian dianggap lumrah atau biasa saja. Israel yang berada di tengah realitas konteks demikian memperlihatkan perbedaan hubungan saudara dalam arti yang luas sehingga solidaritas sosial Israel menguat. Nilai solidaritas itu mendorong Israel memperhatikan keseimbangan hidup bersama. De Vaux dalam Ludji mengungkapkan bahwa⁹

sebagai kelompok yang hidup secara semi nomade, leluhur Israel memelihara sifat sebagai berikut, adanya persamaan hak di antara anggota keluarga. Seluruh anggota keluarga mempunyai hak yang sama untuk menikmati harta milik kepunyaan keluarga. Pada masa sebelum bangsa Israel memasuki dan menetap di Kanaan belum ada perbedaan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena kesadaran solidaritas yang dimiliki kelompok keluarga, kaum dan suku. Kesadaran solidaritas ini diperkokoh oleh hubungan persaudaraan sebagai umat Allah. Walaupun pada masa sebelum memasuki dan menetap di Kanaan ada perbedaan antara budak laki – laki dan budak perempuan, antara yang ditaklukan dengan penakluk, namun perbedaan itu belum menimbulkan masalah sosial. Para budak waktu itu masih merupakan bagian dari keluarga (Boerma 1980: hlm. 12). Di kalangan Israel selama hidup sebagai semi

⁹ Barnabas Ludji, *Disertasi*, STT Jakarta, 1996, 229.

nomade tidak terdapat pembagian kelas sosial (Vaux 1961: hlm.68).

Tampaknya sistem sosial yang berlaku di Israel berbeda dengan bangsa lain yang menganut sistem feodal yang sangat tersebar luas di Timur Dekat. Pada periode mula – mula di Mesopotamia setiap keluarga mempunyai 1 – 2 budak, dan era New Babylonia satu keluarga mempunyai 2 – 5 budak, di Asyur lebih lagi jumlahnya. Tampaknya budak telah tersistimatis di Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya. Pekerja di Mesopotamia menurut kodeks Hammurabi dibayar satu syikal perak sebulan sejak musim bekerja keras, dan kehilangan waktu istirahat satu tahun sedangkan di Israel pekerja harian harus dibayar sebelum matahari terbenam. Pada pertengahan milenium ke dua SM di pasar budak dinilai tigapuluh syikal perak di Nuzu, empatpuluh di Ugarit, tiga puluh di Israel. Sistem sosio politik Israel yang berkembang di tengah masyarakat penetap seperti Kanaan yang feodal juga Mesir yang imperialis menjadi substansi penting Israel dalam mempertahankan keunikan sistem politik dan aspek kekeluargaan dalam konfederasi berdasar pada sistem sosial yang berpola kekeluargaan dalam arti luas dan perlindungan antar keluarga-keluarga yang didasarkan, dihargai dan diboboti dengan kepercayaan mereka pada Yahweh. Hal ini kemudian menjadi dorongan bagi Israel melakukan revolusi sosial, ekonomi, politik terhadap tatanan nilai hidup bangsa penetap. Revolusi sistem sosial politik ditandai dengan perlawanan mendalam terhadap bentuk-bentuk pemerintahan dan pembedaan lapisan sosial yang sudah normatif dalam

pusat-pusat kebudayaan dan politik Timur Tengah Kuno¹⁰, Perkembangan selanjutnya saat Israel terbentuk menjadi kerajaan dengan kepemimpinan raja-raja Israel yang dipandang oleh Israel tidak takut Tuhan maka sistem politik sosial mengalami perubahan yaitu dari nilai solidaritas keluarga, kaum dan suku bergeser menjadi individualitis, dan sistem kelas-kelas sosial berlaku di mana stratifikasi masyarakat yang dijadikan alat perampasan hak-hak masyarakat miskin menjadi menyolok dan kesejangan sosial menguat dan menghadirkan banyak potret orang miskin. Secara politis, perkembangan ini memperkuat sistem politik yang berlangsung karena kemiskinan yang dialami memmbuat hak milik atas tanah keluarga pada akhirnya diserahkan bahkan orang miskin itu dapat menyerahkan dirinya menjadi budak, posisi sebagai kelompok miskin dalam masyarakat menjadi bagian mereka karena hutang pada saudara sebangsanya. Pemahaman tentang sesama saudara sebangsa yang harus hidup sebagai orang merdeka dan dilindungi kesederajatan – keseimbangan hidupnya dalam sistem sosial semula sebagaimana dijelaskan pada bagian awal telah terkikis bahkan nyaris hilang dari pola hidup bermasyarakat Israel.

Perubahan sistem sosiopolitis dialami Israel yang semula terpusat pada aspek keluarga/kekeluargaan, klen atau suku sebagai unit sosial yang kecil ditemukan di kota-kota kecil dan

¹⁰ Christopher J.H.Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1993, 36-37.

populasinya tidak terlalu banyak dari sebuah desa, yang tampak kemudian adalah pola kota dimana aspek kerja, ekonomi dan penguasaan ekonomi (lahan-lahan tanah), kota-kota pengungsian, pemberontakan anak-anak, perzinahan, dan retribusipun menjadi perhatian dalam sistem sosial yang telah berkembang di Israel. Di Israel pergeseran berlangsung di mana perubahan pola patriarkat ke pola individualistis-kota, pola pikir yang berkembang bahwa pangkat, kekayaan, pengaruh dan kekuasaan bagi orang laki-laki menjadi penting dalam kesempurnaan dirinya sebagai laki-laki. Searah dengan hal itu maka secara politis laki-laki terposisi menjadi tua-tua, kepala keluarga, pegawai-pegawai sipil atau petugas/pelayan raja, petugas militer atau komandan pada satu kesatuan, gubernur atau kepala pegawai, administrator, pemilik lahan tanah, pada sisi lain laki-laki juga terposisi sebagai pekerja lahan tanah, budak, orang asing, pedagang keliling, para tukang. Dengan kata lain sistem sosial yang bersinergi dengan sistem politik dibangun dan dikembangkan setelah Israel berkembang menjadi sebuah kerajaan ialah sistem feodal dan hierarki kekuasaan, penguatan segi struktur kekuasaan, keberpihakan raja terhadap sistem dan pelaku sistem yaitu pegawai-pegawainya dalam lingkaran ketidakadilan telah memperkuat Israel dalam kemiskinan dan kesenjangan sosial diantara kelas-kelas sosial di mana terdapat kelas sosial bawah yang dapat disebut sebagai orang miskin seperti petani, budak, orang asing,

janda, yatim piatu yang termarginalkan oleh kelas sosial atas¹¹.

¹¹ Barnabas Ludji, *Disertasi*, (STT Jakarta, 1996, 19, 23), mengungkapkan bahwa istilah אֲבִיּוֹן mempunyai arti miskin secara material atau orang dalam kondisi buruk (lihat Wolf 1962: hlm, 843). Istilah ini banyak dipergunakan oleh para nabi dan pemazmur (lihat Botterweck 1974: hlm. 29). Boerma (1980: hlm. 12) mengatakan bahwa istilah ini berasal dari luar lingkungan Israel dan dipergunakan untuk pertama kalinya dalam Kitab perjanjian (Kel. 20:22-23:33). Bagian Alkitab ini diduga berasal dari zaman yang sangat tua. Istilah ini muncul di Israel setelah struktur sosial bangsa Israel mengalami perubahan. Bahkan Lambdin (dikutip oleh Botterweck 1974: hlm 29) mengatakan bahwa istilah ini berasal dari Mesir yang kemudian dipinjamkan ke dalam bahasa Ibrani sekitar abad ke-12 sM. ; dan dua kata yang umum dalam Perjanjian Lama yang juga berarti miskin berasal dari kata kerja נָחַץ yaitu נָחַץ yang berarti miskin, rendah, rendah hati dan עָנִי yang berarti tertindas, miskin, rendah. Dengan demikian penggunaan istilah-istilah עָנִי, נָחַץ dan עָנִי memperlihatkan hubungan dasar antara penindasan dan kemiskinan dalam pemikiran Ibrani (lih. Hanks 1983: hlm.17). Selanjutnya dikatakan seorang janda bisa saja tidak memiliki apa-apa, karena suaminya miskin akibat tanah mereka telah terjual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Janda yang demikian akan mudah menyalahkan dirinya ke dalam perbudakan jika ia tidak mengalami perkawinan levirate. Dalam keadaan ini mereka menjadi objek pemerasan atau penindasan orang-orang kuat. Kalaupun seorang janda memiliki sebidang tanah, mereka tetap menjadi sasaran para penguasa atau orang kaya, karena kedudukan para janda tidak menuntungkan. Yang memperburuk keadaan para janda ialah karena mereka tidak punya kuasa (lihat Gowen 1987: hlm.

344). Tanpa kuasa mereka tidak mampu memelihara dan mempertahankan sumber penghasilan mereka.. Baab (1962: hlm. 842) sebagaimana dikutip Ludji, 29 , mengungkapkan bahwa seorang janda sama sekali tidak punya hak. Salah satu alasan mungkin di lingkungan Israel ada kepercayaan bahwa jika seorang suami meninggal sebelum umur tua, maka hal itu merupakan bencana, penghukuman karena dosa termasuk istri yang ditinggalkan (band. Rut 1:20, 21; Yesaya 54:4). Anak Yatim yang paling mudah ditindas adalah yatim perempuan yang kehilangan ayahnya karena meninggal (lihat Baab 1962: hlm, 245, 246). Apa yang dikatakan Baab ini berkaitan dengan kedudukan sosial seorang perempuan dalam masyarakat Israel. Kemungkinan mereka menjadi tenaga upahan yang mengalami pemerasan oleh pemilik modal atau petani kaya. Menurut Bimson (1988: hlm. 133), para janda nyaris kehilangan anak-anaknya (yatim) yang diperbuadak oleh kreditor almarhum suaminya. Bahkan kemungkinan anak yatim perempuan juga sering dieksploitasi dalam praktik pelacuran sacral bahkan ini integrasi dengan kehidupan di kuil. Menurut Baab (1962: hlm. 246) praktik ini berkurang setelah reformasi Raja Yosia pada tahun 621 sM. Jumlah anak yatim piatu yang hidup dalam keadaan ini berkurang karena mereka diangkat menjadi anak oleh wanita-wanita mandul. Selanjutnya de Vaux dalam Ludji, *Disertasi*, 267, istilah גר dikenakan kepada siapa saja yang menumpang di wilayah yang bukan wilayahnya. Misalnya Abraham ketika ia berada di negeri orang Het (Kej.23;4) dan Musa ketika berada di median (Kel. 2;22). Ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, orang asli Kanaan dipandang sebagai orang asing yang pantas diperbudak. Di kalangan Israel sendiri suku-suku Lewi yang tinggal di tengah-tengah suku lainnya di padang sebagai orang asing (Ul. 12:12; 14 : 29; 16;12).

Hal ini memberikan gambaran bahwa sistem sosial bersinergi kuat dengan sistem politik di Israel. Fenomena adanya kaum bangsawan dan bukan bangsawan, kapitalisme dan kaum Murba di Israel menguak dalam relitas hidup. Kekayaan didapat dari tanah, kemudian tanah dibagikan keluar

Demikian pun dengan orang Efraim yang tinggal di tengah-tengah suku Benyamin juga dianggap sebagai orang asing (Hak. 19:16). Menurut Gowan (1988: hlm 345), seorang imigran (orang asing), pertama kali memasuki suatu wilayah di Israel jelas kehidupan mereka sangat bergantung pada tuan tanah termasuk sebagai tempat menumpang. Karena itu sebagian ketetapan dan peraturan yang terdapat dalam Alkitab juga memberikan jaminan atau perlindungan bagi orang asing. Alkitab tidak menjelaskan tentang apakah atau bagaimanakah orang-orang asing dapat memperoleh tanah atau hak milik. Kelermenn (1975: hlm. 443) menjelaskan beberapa sebab terjadinya perubahan kedudukan seseorang menjadi גר . Sebab-sebab yang dimaksudkan antara lain karena kelaparan, seseorang atau sekelompok orang meninggalkan kaum atau keluarganya dan bergabung dengan seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari kaum atau keluarga yang lain (lihat Rut 1:1; 1 Raj 8:1). Sebab lain adalah ancaman perang.. karena tekanan militer, seseorang terpaksa hidup sebagai orang asing. Pada zaman kerajaan גר sering mendapat tempat dalam persekutuan Israel (Ul.23). Orang asing tampaknya juga dapat bergabung dengan pasukan Israel (band. 2 Sam.1;13). Disamping itu גר juga dipekerjakan sebagai pemahat batu (1 Taw. 22:2). Menurut 2 Taw. 15:9, orang Israel Utara (Efraim, Manasye dan Simeon) adalah orang asing yang berkumpul bersama-sama dengan orang Yehuda untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan.

dari keluarga-keluarga di mana hal ini menimbulkan kecemburuan sosial karena hal ini berimplikasi politis, karena kekayaan bersinergi dengan kekuasaan dan pengaruh pada penentuan keputusan strategis yang menguntungkan pemerintah dan kelas orang kaya sedangkan orang miskin termarginalkan. Kesenjangan seperti ini tidak dapat dihindari dalam suatu masyarakat yang percaya bahwa Yahweh memberikan ketetapan hukumNYA untuk keseimbangan hidup bermasyarakat. Gottwald sebagaimana dalam Ludji¹² mengungkapkan bahwa: *Pada masa sebelum kerajaan sistem penyebaran suku-suku Israel bersifat vertikal, yaitu berdasarkan hubungan darah, dan setiap suku memiliki tanah pertanian dan tanah untuk beternak, dengan sistem penyebaran seperti ini peranan suku dan kaum untuk melindungi anggota - anggotanya dapat berjalan dengan baik. Namun pada zaman kerajaan penyebaran suku ini merupakan gabungan antara penyebaran vertikal dan horizontal. Penyebaran seperti ini tidak saja ditentukan oleh faktor kekeluargaan tetapi juga didasarkan faktor-faktor lain seperti politik, sosial ekonomi, perdagangan, urbanisasi dan lain-lain. Dengan penyebaran seperti ini maka pemukim yang mendiami suatu wilayah tidak hanya terdiri dari satu suku saja, melainkan sudah bersifat heterogen. Sistem ini mengakibatkan peranan suku dan kaum dalam hal melindungi anggota - anggotanya menjadi sulit dilaksanakan. Maksudnya suatu wilayah yang mulanya hanya dikuasai oleh suatu*

suku ataupun beberapa suku yang saling menolong, pada zaman kerajaan telah dihuni oleh berbagai suku yang tidak lagi merasa sepenanggungan. Penyebaran seperti ini mungkin terjadi akibat munculnya tuan-tuan tanah yang menguasai tanah suku lain melalui jual beli tanah.

Sehubungan dengan pandangan Gottwald, penulis menghadapkan teori hirarkhi stratifikasi dari Weber dalam Gerber, John, Linda, Macionis, *Sociology* juga Rodney Stark, *Sociology* bahwa :

Weber introduced three independent factors that form his theory of stratification hierarchy, which are; class, status, and power:

- **Class:** A person's economic position in a society, based on birth and individual achievement.¹³ Weber differs from Marx in that he does not see this as the supreme factor in stratification. Weber notes how corporate executives control firms they typically do not own; Marx would have placed these people in the **proletariat** despite their high incomes by virtue of the fact they sell their labor instead of owning capital.
- **Status:** A person's prestige, social honor, or popularity in a society. Weber notes that political power is not rooted in

¹³ Gerber, John, Linda, Macionis, *Sociology 7th Canadian Ed.* Toronto, (Ontario: Pearson Canada Inc. 2010), 243;

¹² *Ibid*, 242-243

capital value solely, but also in one's individual status. Poets or saints, for example, can have extensive influence on society despite few material resources.

- **Power:** A person's ability to get their way despite the resistance of others, particularly in their ability to engage social change. For example, individuals in government jobs, such as an employee of the Federal Bureau of Investigation, or a member of the United States Congress, may hold little property or status but still wield considerable social power¹⁴.

Berdasarkan pandangan Gottwald tersebut, menurut penulis Israel yang semula dalam interaksi dan relasi sosial menganut sistem sosial kekeluargaan dalam arti keluarga tidak sebatas hubungan darah tetapi keluarga dalam arti luas (baca: suku, klen, keluarga), setiap anggota unit sosial ini memberlakukan pola perlindungan di kalangan mereka sehingga meskipun terdapat unit sosial yang miskin tetapi tidak menjadi masalah, tidak terjadi kesenjangan dalam sistem sosial. Perubahan sistem sosial searah dengan sistem politik yang mengarah pada aspek individualistis, penguasaan tanah milik keluarga atau klen sehingga menghadirkan stratifikasi masyarakat dalam kelas-kelas sosial. Hal ini penulis senengikan dengan Weber yang mengungkapkan tentang hierarki stratifikasi yang timbul dalam suatu masyarakat karena adanya kelas, status

dan kekuasaan individu dalam masyarakat karena faktor hereditas, pencapaian prestasi dalam hidup, dan politis. Dengan demikian penulis menemukan substansi penting dari kedua pandangan tokoh ini sehubungan dengan penyebaran masyarakat Israel yang berdampak dalam sistem sosial yaitu: - Perubahan sistem sosial dialami Israel berpengaruh pada pola hidup sejak nomaden. Transformasi ini menghadirkan hierarki pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Dampak yang timbul akibat hierarki pembagian masyarakat mengarah pada penguasaan sektor sektor ekonomi produksi dalam masyarakat dibarengi dengan pendominasian dan pemasukan hasil ekonomi produksi yang tinggi sehingga menekan ekonomi masyarakat kelas bawah. Semua hal ini memperlihatkan *progress* suatu masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan dan perubahan itu baik sepanjang tidak menghilangkan karakteristik masyarakat Israel. Tampak bahwa sistem sosiopolitik membawa perubahan karakter masyarakat Israel menjadi feodal dan imperialis, di mana rasa kekeluargaan sesama saudara sebangsa telah hilang dan mereka terperangkaap dalam terali perbudakan, memperbudak saudara sebangsanya yang miskin karena tidak mampu melunasi hutang pada sesama saudara yang menjadi debitor. Keunikan berakar pada religiusitas Yahweh tidak dapat dipertahankan di tengah masyarakat penatap

¹⁴Rodney Stark . *Sociology, Tenth Edition*. 2007, Thompson Wadsworth.

Penguatan religiusitas Yahweh di tengah transformasi sistem politik Israel

Mencermati perkembangan sistem sosiopolitik Israel yang tidak lagi memperlihatkan keunikan pola suzerain vassal yang berakar pada religiusitas Yahweh, para penulis kitab-kitab Perjanjian Lama memberikan perhatian serius terhadap eksistensi Israel yang harus mempertahankan sistem politik teokrasi di tengah bangsa sekitar. Penerapan sistem politik bangsa sekitar yang terpusat pada raja sebagai dewa atau anak dewa yang tidak pernah salah dan memiliki kemutlakan hak terhadap segala sesuatu, tidak dapat diterapkan searah dengan transformasi sistem politik Israel yang menganut teokrasi. Raja yang dipilih oleh Tuhan harus menerapkan kepemimpinan Yahweh sehingga raja dan seluruh rakyat Israel tunduk pada hukum-hukum Yahweh. Dari segi religius, Israel percayai dan pahami bahwa Yahweh menetapkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan termasuk hukum tentang raja (Ulangan 17:14-20). Kepemimpinan seorang raja yang ditetapkan Yahweh dan diurapi nabi¹⁵,

¹⁵ Ludji dalam *Disertasi* mengungkapkan beberapa teori para ahli mengenai munculnya kerajaan dikemukakan oleh Finkelstein (1989: hlm 45-46). Beberapa ahli berpandangan bahwa munculnya lembaga kerajaan di Israel disebabkan oleh unsure eksternal yaitu ancaman dari luar yaitu bangsa Filistin, Amon, dan Amalek. Wilayah pendudukan Israel yang terpisah-pisah secara geografis terdiri dari unit-unit kecil yang dipimpin oleh para hakim tidak mampu mengatasi ancaman-ancaman dari pihak Filistin. Kekalahan demi kekalahan

dialami Israel. Keadaan seperti ini berlangsung dalam periode yang sangat panjang. Bangsa Filistin unggul dalam berbagai bidang kehidupan atas Israel. Untuk menghadapi ancaman-ancaman itu Israel memerlukan penyatuan kekuatan di bawah seorang pemimpin. Keinginan bangsa Israel ini pertama kali terwujud melalui kepemimpinan Saul. Dengan demikian berakhirilah zaman hakim-hakim, dan zaman kerajaan dimulai di wilayah Benyamin yang merupakan pusat ancaman bangsa Filistin (lihat Finkelstein 1989: hlm, 44-45); band. Gottwald 1979: hlm.416) . Menurut Finkelstein (1989: hlm. 46), pandangan di atas tidak memperhatikan proses perkembangan internal terutama yang terjadi dalam wilayah pendudukan di pegunungan pada abad ke-11 sM. Perkembangan internal juga merupakan salah satu sebab munculnya kerajaan. Menurut ahli-ahli (service Flannery, Claessen, Fried dan lain-lainnya seperti dikutip oleh Finkelstein 1989: hlm. 46,47), munculnya kerajaan terjadi dalam proses sosial-politik, yaitu proses perkembangan dari kelompok, suku, pemimpin lokal dan terakhir negara atau kerajaan. Fried menggunakan istilah yang berbeda, yaitu masyarakat yang merasa sederajat, tingkatan masyarakat, klasifikasi masyarakat dan akhirnya negara atau kerajaan. Tahapan yang penting dalam studi tentang munculnya lembaga kerajaan di Israel ialah kepemimpinan yang bersifat kesukuan dan kerajaan. Kadang-kadang sangat sulit untuk membedakan antara kepemimpinan yang bersifat kesukuan pada periode awal kerajaan. Beberapa ahli berusaha membedakan kedua tahapan sosial-politik tadi dalam hubungan dengan pembentukan kerajaan Israel mengatakan bahwa kepemimpinan Saul adalah tipe kepemimpinan yang bersifat kesukuan, sedangkan kerajaan Daud merefleksikan periode transisi dari suatu kepemimpinan yang bersifat kesukuan ke periode kerajaan dan mulai masa Salomo dapat

Sentralisasi kuasa dan kepemimpinan pada raja diterapkan, tetapi rajapun harus berada di bawah hukum yang ditetapkan Yahweh. Seorang raja Israel meskipun terposisi menjadi orang nomor satu di Israel tetapi tetaplah merupakan raja bawahan di bawah kendali Yahweh. Terbentuknya kerajaan Israel, terdapat pembatasan kuasa oleh ketentuan bahwa raja haruslah satu dari antara saudara-saudaramu” yang tidak “menganggap dirinya lebih daripada saudara-saudaranya” atau meniru kemewahan yang berlebihan dari kerajaan di sekitarnya (Ulangan 17:15-20). Keunikan Israel dari segi politik pemerintahan seorang raja yang berbeda dari bangsa sekitar yang memperlihatkan eksklusif Israel. Transformasi sistem politik Israel yang searah dengan sistem politik bangsa sekitar telah mengantarkan Israel menjadi vassal dari bangsa-bangsa sekitar. Israel mengalami masa penewanan atau pembuangan,

diklasifikasikan sebagai periode kerajaa (lihat Flanagan seperti yang dikutip Finkelsten 1989: hlm.47). Sedangkan Edelman (dikutip oleh Finkelsten 1989: hlm. 47) berpendapat bahwa zaman Saul merupakan masa transisi dan kerajaannya bersifat kedaerahan. Perkembangan perdagangan juga merupakan salah satu factor yang mendorong berdirinya kerajaan. Menurut Wright dan Johnson (seperti dikutip oleh Finkelstein 1989: hlm.50), keberhasilan bangsa Israel di bidang perdagangan telah membawa kemakmuran. Hal ini membawa kemajuan di bidang administrasi tetapi juga menghasilkan tingkatan masyarakat dsb. Perdagangan interregional atau intraregional mengakibatkan munculnya suatu negara atau suatu bangsa.

dipindahkan dari tanah Israel dan ditempatkan pada wilayah bangsa penakluk. dan persoalan bagaimana mempertahankan eksistensi Israel sebagai bangsa pilihan Yahweh yang mempunyai Allah lebih besar dari dewa-dewa bangsa penakluk, Yahweh adalah Pahlawan Perang yang mempunyai kuasa mengalahkan kuasa dan kekuatan bangsa manapun di tengah kehidupan bangsa penakluk menjadi hal konkrit yang disoroti oleh para imam, bagaimana bentuk kesetiaan Israel sebagai umat pilihanNYA dikonsepsikan di tengah kondisi politik bangsa penakluk menjadi perhatian serius para imam. Artinya bahwa dari segi religius para imam memberikan konsentrasi pada peristiwa kekalahan dan penaklukan politik Israel oleh bangsa penakluk sebagai wujud ketidaktaatan raja dan Israel sebagai vassal daripada Yaweh sebagai suzerain. Berhadapan dengan kondisi yang demikian para penulis kitab-kitab Perjanjian Lama dalam hal ini penulis kitab Ulangan 17:15-20 berupaya mengarahkan raja Israel untuk takluk pada Suzerain, Yahweh.

Pergeseran berlangsung dalam peta sistem politik Israel, ketika raja Israel tidak menerapkan teokrasi dalam bingkai perjanjian suzerain vazzal. Hal ini mendorong penulis kitab Perjanjian Lama dalam hal ini penulis kitab Ulangan mengedepankan nilai kepemimpinan Yahweh melalui hukum tentang raja Ulangan 17:15-20. Melalui hukum tentang raja yang membatasi hak dan kewenangan raja Israel. Kedudukan sebagai raja Israel tidak memberikan legitimasi otomatis bahwa raja lebih dalam segala hak-haknya

dibanding rakyat Israel. Kedudukan tersebut tidak membuat raja dalam predikat tidak pernah salah sehingga raja dengan hak-haknya dapat menetapkan produk-produk keputusan yang tidak berpihak pada rakyatnya (orang miskin, janda, anak yatim, orang asing di Israel). Hukum ini mengalokasikan nilai-nilai hidup bangsa pilihan Yahweh tersebut. Hal ini berarti Israel yang mengalami transformasi sistem politik harus tetap menerapkan sistem politik teokrasi. Penulis menelisik sistem politik Israel dengan menggunakan teori sistem politik David Easton yang memberi perhatian pada revolusi *behaviour* dengan penekanan pada struktur dan fungsi tingkah laku dalam mencapai tujuan suatu negara¹⁶. Pokok-pokok penting dari teori tersebut yaitu: a. pengalokasian nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif; b. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh unsur yang memiliki kewenangan otoritatif di mata warga negara dan konstitusi; c. Sistem politik bekerja menghasilkan keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai. Mencermati transformasi sistem politik Israel yaitu teokrasi dalam pola perjanjian suzerain vassal telah searah dengan sistem politik bangsa sekitar, tampak nilai-nilai yang menjadi *life style* suku-suku Israel sejak padang gurun hingga berkonfederasi dan menjadi suatu kerajaan yang berakar kuat dalam religiusitas Yahweh

¹⁶ Penulis menggunakan teori ini karena teori ini tidak sebatas mengkaji lembaga formal pada negara tetapi juga aspek-aspek non formal yang mempengaruhi suatu kebijakan atau keputusan atau lebih tepatnya mengkaji proses politik yaitu input politik, sistem atau proses politik hingga output.

mengalami pergeseran. Para pemimpin suku, klen, para tua dan raja seharusnya berada di bawah kendali Yahweh dalam kepemimpinannya, artinya di hadapan rakyat Israel mereka adalah pemimpin yang harus menerapkan kepemimpinan Yahweh bagi rakyat Israel disertai nilai-nilai yang menghargai hak-hak rakyat demi tertib sosial. Legitimasi otoritatif melalui kepemimpinan kepala klen, suku, para tua dan raja tampak pada para pemimpin yang taat pada hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari Yahweh. Keputusan-keputusan politik, produk hukum dan peraturan raja Israel harus mengakomodir nilai-nilai yang mengedepankan identitas Israel sebagai umat pilihan Yahweh, yang tetap berada dalam pola susezarin vassal sehingga kepemimpinan teokrasi tetap terpraktekan.

Penutup

Suku-suku Israel berkoferedasi saat menetap di Palestina menempatkan Yahweh sebagai Yang Disembah. Yahweh menjadi pemersatu suku-suku secara religius, sosial dan politik tetapi searah dengan itu produk-produk hukum-hukum yang berlaku di Israel baik pada ruang sosial, ekonomi, politik, dan religius rujuk pada pola perjanjian dengan Yahweh. Religiusitas Yahweh tampak mendapat tempat dalam sistem politik Israel: teokrasi terbingkai pola suerain vassal. Pola kepemimpinan awal pada kepala klen, suku, para tua-tua dan raja terarah mencerminkan teokrasi dalam upaya mempertahankan eksistensi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Yahweh. Hal ini menjadi kekuatan Israel melakukan revolusi sosial ekonomi

ketika menetap, berkonfederasi, menjadi suatu kerajaan di Palestina. Transformasi berlanjut ketika Israel mengadopsi sistem politik bangsa sekitar: *kings no wrong*, kapitalisme, feodalisme, raja memiliki kewenangan seluas-luasnya dibanding rakyat. Hal ini bertentangan dengan teokrasi. Penulis kitab-kitab Perjanjian Lama, dalam hal ini penulis Ur-Deuteronomy dalam teks Ulangan 17: 15-20: Hukum tentang raja, menekankan keterbatasan raja Israel karena raja menerapkan kepemimpinan Yahweh. Searah dengan itu teori sistem politik yang digunakan memperhadapkan alokasi nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bangsa Israel, hukum-hukum dan peraturan-peraturan secara otoritatif oleh raja, semuanya terarah menciptakan tertib sosial umat pilihan Yahweh.

KEPUSTAKAAN

Gerber, John, Linda, Macionis, *Sociology 7th Canadian Ed.* Toronto-Ontario: Pearson Canada Inc. 2010

Gottwald Norman K., *The Tribes of Yahweh*, New York, Orbis Book

Hinson David F., *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1991.

Robert B. Coote Robert B., *Demi Membela Revolusi*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 2011 .

Wright Christopher H.H., *Hidup Sebagai Umat Allah*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1993.

Rodney Stark . *Sociology, Tenth Edition.* 2007, Thompson Wadsworth.

YKBB, *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II*, Jakarta, OMF, 2005.

REFERENSI LAINNYA

Ludji Barnabas , *Disertasi*, STT Jakarta, 1996.

WEBTOLOGI

<https://www.zonareferensi.com>